

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Adapun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah segera menyelesaikan kegiatan pembangunan penahanan atau turap dan pemecah gelombang di seluruh pantai Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Adapun faktor penghambat tanggung jawab pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai ialah dana anggaran APBD untuk pembangunan penahanan atau pemecah gelombang yang membutuhkan biaya banyak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis di lapangan dan menganalisisnya, maka dalam hal ini penulis menyarankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkali untuk lebih meningkatkan upaya dalam penanggulangan abrasi pantai di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, ada beberapa saran yang menjadi rekomendasi penulis yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih menguatkan koordinasi antar sektor/lembaga/instansi yang memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penanggulangan abrasi baik secara alami atau rehabilitasi maupun secara buatan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan program yang terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pelaksanaan kegiatan.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai. Hal ini agar lembaga terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum memiliki pedoman dan aturan jelas yang jelas dan lebih fokus.